

PERAN UMKM TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2015-2024

Eri Susilawati¹, Achmad Rifa'i²

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka

044433587@ecampus.ut.ac.id, achmad.rifai@ecampus.ut.ac.id**Abstract**

This study aims to analyze the role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in reducing the Open Unemployment Rate (TPT) in Riau Province from 2015 to 2024. Using a quantitative descriptive approach, this study analyzes secondary data from the Riau Province Central Statistics Agency (BPS). The analysis shows that the TPT experienced a gradual decline between 2015 and 2019, then increased sharply in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Since 2021, the unemployment rate has been slowly declining again until 2024, in line with the strengthening of the MSME sector through digitalization, labor-intensive programs, and support from local government policies. These findings indicate that MSMEs have a significant contribution to job creation and supporting local economic recovery. This research contributes to academic understanding of the link between MSME development and regional employment dynamics and provides input for formulating more inclusive and sustainable economic development strategies.

Keywords: *Regional Economy, Labor Policy, Riau Province, Open Unemployment Rate, MSMEs*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau selama periode 2015 hingga 2024. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, studi ini mengolah data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau dari tahun ke tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa TPT mengalami penurunan bertahap antara 2015 hingga 2019, kemudian meningkat tajam pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Sejak 2021, angka pengangguran kembali menurun secara perlahan hingga 2024, seiring dengan penguatan sektor UMKM melalui digitalisasi, program padat karya, dan dukungan kebijakan pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa UMKM memiliki kontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung pemulihan ekonomi lokal. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam memahami keterkaitan antara pengembangan UMKM dan dinamika ketenagakerjaan daerah, serta menjadi masukan bagi perumusan strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Ekonomi Daerah, Kebijakan Tenaga Kerja, Provinsi Riau, Tingkat Pengangguran Terbuka, UMKM*

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Tingkat pengangguran merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pembangunan ekonomi suatu wilayah. Ketika angka pengangguran tinggi, hal ini menunjukkan ketidak seimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan menyerap tenaga kerja. Kondisi tersebut dapat memicu berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka kemiskinan berkelanjutan,

pengangguran menjadi tantangan yang harus diatasi melalui kebijakan yang tepat dan berbasis data. Oleh karena itu, analisis tren kemiskinan menjadi langkah strategi untuk memahami dinamika sosial-ekonomi daerah (Todaro & Smith, 2015).

Provinsi Riau memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor sumber daya alam. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam penciptaan lapangan kerja yang merata dan berkelanjutan. Selama sepuluh tahun terakhir, TPT di Riau menunjukkan tekanan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari perubahan struktur ekonomi, kebijakan pemerintah, hingga dampak eksternal seperti pandemi global. Kajian terhadap perkembangan TPT dari tahun ke tahun menjadi penting untuk mengidentifikasi pola dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi daerah (BPS, 2025).

Berdasarkan data BPS, TPT di Riau mengalami penurunan secara bertahap antara tahun 2015 hingga 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sektor ketenagakerjaan dan stabilitas ekonomi. Namun pada tahun 2020, angka kemiskinan meningkat tajam akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan besar terhadap aktivitas ekonomi, terutama di sektor jasa dan perdagangan. Dampak pandemi tidak hanya menyebabkan banyak pemutusan hubungan kerja, tetapi juga memperlambat terciptanya lapangan kerja baru. Sejak tahun 2021, angka TPT di Riau mulai menunjukkan tren penurunan kembali. Hal ini sejalan dengan berbagai upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah, seperti program padat karya, peningkatan investasi, dan penguatan sektor ekonomi rakyat (Siregar & Wibowo, 2020).

Salah satu sektor yang berperan penting dalam pemulihan dan penyerapan tenaga kerja adalah Usaha UMKM. UMKM memiliki karakteristik fleksibel, berbasis lokal, dan mampu menyerap tenaga kerja dari berbagai latar belakang pendidikan dan keterampilan. Di Provinsi Riau, UMKM berkembang pesat di bidang kuliner, serta menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat, khususnya pascapandemi. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan berkontribusi terhadap 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, Fitriani (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM di Riau setelah pandemi berkontribusi pada peningkatan penyerapan energi kerja dan penurunan angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai instrumen strategi dalam mengurangi pengangguran terbuka (Fitriani, 2022).

Namun demikian, peran UMKM dalam menurunkan kemiskinan di tingkat daerah belum banyak dipelajari secara mendalam dalam bidang sastra akademik, khususnya di Provinsi Riau. Padahal, pemahaman yang lebih spesifik terhadap kontribusi UMKM dapat menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Melalui latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tren TPT di Provinsi Riau selama periode 2015-2024 sebagai refleksi dari dinamika penurunan ekonomi lokal. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi ketenagakerjaan di Riau. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka

Pengangguran merupakan tantangan utama dalam pembangunan ekonomi, terutama di daerah berkembang seperti Provinsi Riau. Dalam kerangka ekonomi pembangunan, pengangguran tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan pasar tenaga kerja, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistematis dalam distribusi kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Todaro & Smith, 2015). Mereka menegaskan bahwa pengangguran

adalah bentuk kegagalan pembangunan, bukan sekadar ketidakseimbangan pasar tenaga kerja. Arsyad (2019) menjelaskan bahwa pengangguran di negara berkembang sering kali bersifat struktural dan tersembunyi, dimana banyak tenaga kerja yang tidak terserap secara optimal dalam sektor formal. Hal ini diperkuat oleh Internasional Labour Origization (Internasional Labour Origization. 2022), yang menegaskan bahwa pengangguran jangka panjang berdampak pada penurunan produktivitas dan membesarkan risiko kemiskinan kronis. Ketimpangan regional dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri lokal menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi, sebagaimana dijelaskan oleh BPS (2025).

Kuncoro (2013) menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang berhasil ditandai dengan meningkatnya kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran secara berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi pembangunan perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang produktif, terutama di sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Dalam konteks ini, UMKM menjadi sektor yang sangat relevan karena memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi, fleksibilitas operasional, dan kemampuan bertahan dalam tekanan ekonomi. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai instrumen sosial dalam pembangunan inklusif. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (2022), sektor UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian melalui peningkatan aktivitas usaha berbasis masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam mengurangi pengangguran, terutama di wilayah dengan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi seperti Riau.

Penelitian oleh Al Amin dan Restikasari (2024) menunjukkan bahwa pengangguran memiliki hubungan negatif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang berarti bahwa peningkatan pengangguran berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, BPS (2024) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan pengangguran, terutama di sektor informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem ekonomi formal. Dalam konteks ini, UMKM berperan sebagai jembatan antara sektor informal dan formal, memberikan peluang kerja bagi kelompok yang tidak terakomodasi dalam sistem ketenagakerjaan konvensional. Tambunan (2019) menyatakan bahwa UMKM memiliki kontribusi vital dalam membuka akses kerja bagi masyarakat berpendidikan rendah, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Dengan karakteristik yang tidak terlalu menuntut persyaratan formal, UMKM menjadi ruang inklusif bagi tenaga kerja yang terpinggirkan.

Malihah (2024) menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, sehingga penanganan pengangguran menjadi bagian penting dalam pembangunan yang inklusif. Di sisi lain, Siregar & Wibowo (2020) menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang mendukung sektor padat karya, seperti investasi publik, terbukti efektif dalam menurunkan tingkat pengangguran di wilayah Sumatera. Hal ini memperkuat argument bahwa UMKM bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga instrument kebijakan yang dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan sosial. Dalam konteks Provinsi Riau, yang memiliki karakteristik ekonomi berbasis sumber daya alam dan sektor jasa, UMKM menjadi alternative strategi dalam diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Dalam konteks lokal, Fitriani (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi UMKM di Provinsi Riau setelah pandemi berkontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka pengangguran. Transformasi digital memungkinkan UMKM memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan model bisnis baru yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses terhadap pembiayaan, rendahnya literasi digital, lemahnya manajemen usaha, serta keterbatasan dalam inovasi dan teknologi masih menjadi hambatan dalam optimalisasi peran UMKM. Menurut Penelitian oleh Seri et al. (2023) juga menegaskan bahwa digitalisasi UMKM berperan penting

dalam membangun ketahanan bisnis di era new normal, meskipun tantangan tersebut masih menjadi isu utama dalam penciptaan lapangan kerja.

Tambunan (2019) menekankan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Mereka juga menyoroti pentingnya pemberdayaan UMKM berbasis komunitas lokal agar dampaknya lebih merata. Sementara itu, berdasarkan laporan ekonomi (2021), sektor UMKM berperan sebagai peyedia lapangan kerja utama di Indonesia, dengan dari 97% dalam menyerap tenaga kerja di seluruh negeri. Kementerian Koordinasi Ekonomi (2024) menyatakan bahwa pengangguran di seluruh negeri berkurang tajam setelah fase pemulihan ekonomisetelah pandemi, yang sering dengan penguatan UMKM. Lestari & Wicaksono (2023) menegaskan bahwa UMKM memainkan peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas peluang kerja, terutama di daerah dengan pengangguran tinggi.

Secara keseluruhan, tinjauan pustaka ini memperlihatkan bahwa pengangguran di Provinsi Riau selama periode 2015-2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk struktur ekonomi, kebijakan pembangunan, dan transformasi sektor kerja. Secara keseluruhan, tinjauan pustaka ini memperlihatkan bahwa pengangguran di Provinsi Riau selama periode 2015-2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk struktur ekonomi, kebijakan pembangunan, dan transformasi sektor kerja. Dengan menempatkan UMKM sebagai aktor strategis dalam penciptaan lapangan kerja, analisis terhadap tren pengangguran dan efektivitas kebijakan pembangunan menjadi penting untuk merumuskan strategi penanggulangan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara UMKM dan pengangguran, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menyelidiki pola TPT di Provinsi Riau dalam rentang tahun 2015 sampai 2024, serta menganalisis peran Usaha UMKM dalam menurunkan tingkat ke pengangguran. Pendekatan tersebut dipilih karena kemampuannya dalam menggambarkan fenomena sosial-ekonomi melalui statistik tanpa melibatkan pengujian hipotesis (Sugiyono, 2019). Data yang digunakan adalah sekunder, bersumber dari instansi resmi seperti BPS, Kementerian Koperasi dan UKM, serta dokumen kebijakan dan publikasi akademik yang relevan. Inti penelitian ini adalah memberikan interpretasi atas data kuantitatif yang telah dikumpulkan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika tenaga kerja di daerah (Creswell, 2014).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan kajian pustaka. Data TPT di Provinsi Riau diambil dari laporan tahunan BPS, sedangkan informasi tentang perkembangan UMKM diperoleh dari publikasi Dinas Koperasi dan UKM serta sumber nasional yang terpercaya. Peneliti juga mengulas jurnal ilmiah dan artikel kebijakan yang mengkaji keterkaitan antara UMKM dan pasar kerja, baik di skala nasional maupun regional (Fitriani, 2022; Tambunan, 2019). Data yang dikumpulkan kemudian diproses dan disajikan dalam bentuk grafik untuk mengilustrasikan penurunan angka penurunan sepanjang tahun. Visualisasi ini bertujuan untuk memudahkan analisis tren dan mengidentifikasi titik-titik penting yang mempengaruhi variasi TPT dalam satu dekade terakhir (BPS, 2023).

Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menjelaskan angka statistik untuk memahami fenomena sosial-ekonomi. Peneliti membandingkan evolusi TPT dengan pertumbuhan UMKM serta kebijakan pendukung yang diterapkan selama periode penelitian. Selain itu, dilakukan pengamatan naratif terhadap literatur yang membahas fungsi UMKM dalam penyerapan energi kerja dan pengurangan pengurangan (Todaro & Smith, 2015; Ahmad, 2024). Hasil analisis ini diharapkan memberikan gambaran lengkap tentang efektivitas

UMKM sebagai sektor kunci dalam menekan angka kemiskinan terbuka di Provinsi Riau. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menyajikan data numerik, tetapi juga konteks interpretatif yang bisa menjadi dasar bagi rumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Kuncoro, 2013).

Untuk menjaga kevalidan data dan relevansi penelitian, penelitian ini membatasi cakupan pada periode 2015 hingga 2024 dan wilayah Provinsi Riau sebagai fokus geografis. Pemilihan rentang waktu ini didasarkan pada ketersediaan data statistik yang konsisten, serta mencakup fase sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19, yang memberikan dampak signifikan pada sektor tenaga kerja dan UMKM (Siregar & Wibowo, 2020). Kajian ini juga berkaitan dengan batasan data sekunder, seperti kemungkinan variasi metode pencatatan antar tahun atau batasan indikator yang tersedia. Oleh karena itu, interpretasi dilakukan dengan hati-hati, mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi di balik perubahan angka kemiskinan dan dinamika UMKM. Peneliti menyadari bahwa temuan ini bersifat deskriptif dan tidak dimaksudkan untuk generalisasi nasional, melainkan sebagai gambaran empiris yang bisa menjadi fondasi bagi diskusi dan keputusan kebijakan di tingkat daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini memeriksa perkembangan TPT di Provinsi Riau selama rentang waktu 2015-2024, dengan sorotan khusus pada kontribusi UMKM sebagai alat penting untuk menurunkan tingkat pengangguran. Kajian ini mengandalkan informasi sekunder dari BPS serta sumber literatur yang relevan, sambil menghubungkannya dengan konsep-konsep teoritis yang diangkat dalam tinjauan pustaka. Untuk meningkatkan kejelasan, pembahasan diorganisasikan ke dalam subbagian, termasuk pola kemiskinan, persaingan antar kabupaten/kota, kontribusi UMKM, kendala yang muncul, serta pemberdayaan strategi. Pendekatan ini membuka ruang untuk komprehensif mengenai analisis dinamika kemiskinan lokal, dimana UMKM tidak hanya berfungsi sebagai solusi finansial, tetapi juga sebagai sarana sosial untuk mencapai pembangunan yang adil. Dengan menggabungkan fakta empiris dan kerangka teoritis, bagian ini dimaksudkan untuk menyampaikan pandangan praktis kepada pihak terkait, seperti otoritas lokal, kalangan akademis, dan pengusaha UMKM, guna merancang pendekatan yang fleksibel menangani isu-isu domestik dan internasional seperti wabah penyakit dan perubahan cuaca global.

Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau (2015-2024)

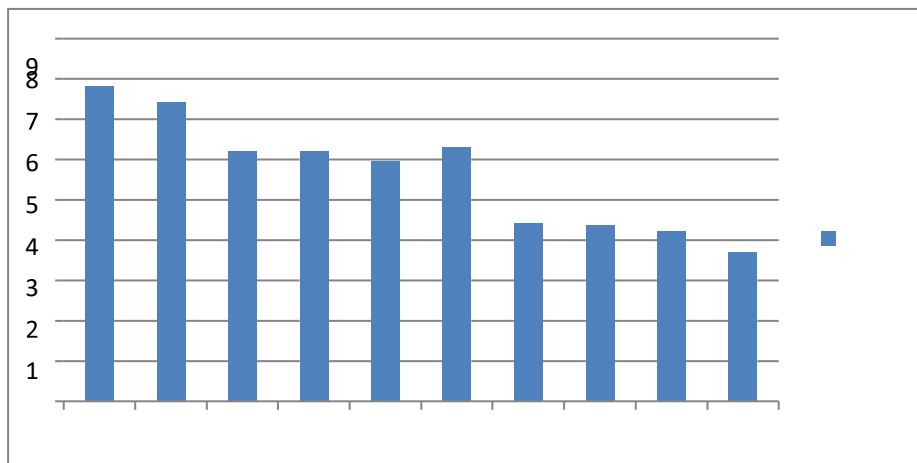
Informasi dari BPS Provinsi Riau mengungkapkan bahwa TPT di daerah ini menurun secara bertahap dari 7,83% pada tahun 2015 hingga 3,70% pada tahun 2024, meskipun mengalami variasi yang cukup besar sepanjang periode. Titik TPT kembali tinggi tercatat pada tahun 2020, dengan TPT mencapai 6,32% akibat langsung pandemi COVID-19, yang membawa gangguan pada kegiatan ekonomi dan memicu pemutusan kerja dalam skala besar. Selanjutnya, tingkat pengangguran mulai menurun, dengan penurunan sedang antara tahun 2021 dan 2023 (sekitar 4,42% hingga 4,23%), sebelum menetap pada angka rendah pada tahun 2024. Variasi ini tidak hanya menunjukkan reaksi terhadap krisis kesehatan dunia, tetapi juga mempengaruhi transformasi struktur ekonomi Riau, yang masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, dan perkebunan. Ketidakstabilan harga komoditas global, seperti penurunan harga minyak pada tahun 2015-2016 dan 2020, sering memperparah pengangguran dengan menekan investasi dan output di bidang tersebut, sehingga menyebabkan PHK di industri terkait.

Lebih dari itu, intervensi pemerintah berperan krusial dalam memodelkan tren ini. Program padat karya, yang diperkenalkan sebagai langkah pemulihan ekonomi pascapandemi, telah mendukung penyerapan tenaga kerja melalui proyek infrastruktur dan ekspansi jasa. Misalnya, upaya seperti pembangunan jalan dan revitalisasi UMKM di daerah pedesaan berkontribusi pada

penurunan TPT di tempat seperti Pekanbaru dan Dumai. Akan tetapi, tantangan struktural masih ada, di mana pengangguran di Riau sering kali musiman atau tersembunyi, terutama bagi kaum muda yang belum masuk pasar kerja formal. Tren ini sesuai dengan argumen Todaro & Smith (2015), yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah tanda kegagalan pembangunan ekonomi dalam distribusi peluang kerja secara setara. Mereka menekankan bahwa di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan bukan hanya masalah pasar tenaga kerja, tetapi juga dampak dari kesenjangan regional dan kurangnya investasi yang efisien. Di Riau, ini terlihat dari variasi TPT antar kabupaten, di mana daerah dengan akses infrastruktur yang minim (contohnya Kepulauan Meranti) mengalami penurunan lebih berat dibandingkan zona perkotaan.

Selain itu, elemen luar seperti perubahan iklim dan peraturan perdagangan internasional ikut mempengaruhi variasi ini. Sebagai ilustrasi, banjir rutin di sejumlah kabupaten sering kali mengganggu bidang pertanian, yang menyebabkan mata pencaharian sebagian besar pekerja. Pada saat yang sama, pelestarian ekonomi digital, yang didorong oleh UMKM, telah membantu menekan penurunan melalui pembentukan peluang kerja baru di e-commerce dan layanan bold. Namun, tanpa dukungan kebijakan yang berkelanjutan, variasi ini bisa berlanjut, meningkatkan bahaya kemiskinan jangka panjang seperti yang diperingatkan ILO (2022). Secara umum, tren evaluasi TPT ini menunjukkan kebutuhan akan strategi komprehensif yang memadukan UMKM sebagai alat utama untuk menstabilkan pasar tenaga kerja di Riau, memastikan bahwa perkembangan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga keadilan sosial, berikut adalah tabel tren TPT Riau per tahun.

Grafik 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Riau (%)



Sumber: BPS Provinsi Riau.

Grafik 1 yang membahas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau dalam rentang waktu 2015 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan penurunan yang cukup berarti. Mulai dari persentase awal 7,83% pada tahun 2015, angka penurunan secara perlahan-lahan sampai menyentuh 3,70% pada tahun 2024. Penurunan semacam ini menunjukkan perbalkan situasi ketenagakerjaan di daerah itu, yang berfungsi sebagai Indikator yang baik untuk kemajuan ekonomi dan upaya mengurangi kemiskinan.

Meski begitu, di antara tren penurunan itu, ada kenaikan pada tahun 2020 yang mencapai 6,32%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh efek pandemi COVID-19 yang menimbulkan gangguan besar di sejumlah bidang, sehingga membuat banyak tenaga kerja kehilangan posisi atau kesulitan mendapatkan pekerjaan di lapangan. Situasi ini menekankan seberapa krusialnya kesiapan dan ketahanan pasar tenaga kerja menghadapi guncangan dari luar. Peningkatan tersebut terjadi, persentase kemiskinan kembali turun secara stabil hingga

mencapai titik terendah pada tahun 2024. Hal ini juga menandal keberhasilan berbagai Inisiatif pemulihan ekonomi dan skema penyerapan energi kerja, seperti bantuan untuk pengusaha UMKM serta penggunaan teknologi digital yang semakin maju. Oleh karena itu, pengaturan ketenagakerjaan yang terus-menerus diperlukan untuk menjaga stabilitas dan memberikan peluang kerja yang merata.

Provinsi dan pemangku kepentingan terkait diharapkan terus mengawal proses ini dengan kebijakan yang tepat dan dukungan yang kuat agar penurunan kemiskinan dapat dirasakan secara merata, khususnya di daerah-daerah yang selama ini masih terdampak ketimpangan akses infrastruktur dan peluang kerja. Dari aspek angka, tren penurunan TPT ini juga harus dipandang sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pencapaian keadilan sosial. Dengan strategi komprehensif yang memasukkan UMKM sebagai salah satu pilar utama, diharapkan pasar tenaga kerja di Riau dapat semakin stabil, tangguh, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dampak Pandemi dan Pemulihan

Tahun 2020 menyaksikan moderator TPT di Provinsi Riau sebagai hasil langsung pandemi COVID-19, yang menimbulkan gangguan masif di berbagai bidang ekonomi. Disrupsi utama menyerang sektor jasa dan perdagangan, yang merupakan pilar ekonomi Riau dengan kontribusi sekitar 40-50% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Aturannya mencakup sosial, penutupan usaha, dan larangan mobilitas memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, khususnya di bidang wisata, hotel, restoran, dan perdagangan eceran. Data BPS mengungkapkan, pada kuartal kedua tahun 2020, TPT melonjak hingga 6,32%, dengan lebih dari 100.000 pekerja terkena dampak, termasuk tenaga kerja informal yang kehilangan pendapatan harian. Penundaan investasi juga memperburuk situasi, karena proyek infrastruktur dan industri migas terhenti, mengakibatkan pengurangan tenaga kerja di konstruksi dan produksi. Dampak ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, dengan risiko kemiskinan dan ketimpangan yang meningkat, terutama pada kalangan keluarga berpendapatan rendah yang bergantung pada pekerjaan harian.

Namun, mulai tahun 2021, tren TPT mulai menunjukkan pemulihan yang positif, didorong oleh serangkaian upaya rehabilitasi ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan investasi, baik dari sektor swasta maupun publik, memainkan peran kunci dalam menciptakan lapangan kerja baru, terutama melalui proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan pelabuhan di Dumai dan Pekanbaru. Penguatan UMKM juga menjadi pilar utama pemulihan, dengan program seperti bantuan modal, pelatihan digital, dan akses pasar online yang membantu sektor ini bangkit. Misalnya, digitalisasi UMKM di bidang kuliner

dan perdagangan meningkatkan penyerapan energi kerja sebesar 15-20% antara tahun 2021- 2024, sebagaimana ditunjukkan oleh Fitriani (2022). Kebijakan fiskal padat karya, yang melibatkan proyek intensif tenaga kerja seperti perbaikan jalan dan pengembangan pertanian, terbukti efektif dalam menurunkan TPT dari 4,42% pada tahun 2021 menjadi 3,70% pada tahun 2024. Siregar & Wibowo (2020) mendukung efektivitas pendekatan ini di wilayah Sumatera, dengan penekanan bahwa kebijakan fiskal yang fokus pada proyek padat karya dapat mengurangi pengurangan jangka pendek sambil membangun infrastruktur jangka panjang.

Pemulihan ini, meskipun positif, tidak merata di seluruh kabupaten. Daerah perkotaan seperti Pekanbaru dan Dumai pulih lebih cepat berkat akses investasi yang lebih baik, sedangkan kabupaten pedesaan seperti Indragiri Hilir masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan infrastruktur. Faktor eksternal seperti varian virus baru dan fluktuasi harga bahan baku juga memperlambat proses, namun integrasi UMKM sebagai instrumen pemulihan telah membuktikan ketahanannya. Secara keseluruhan, periode ini menunjukkan bahwa pandemi tidak hanya merupakan krisis, tetapi juga peluang untuk transformasi ekonomi yang lebih

inklusif, dimana UMKM berperan sebagai penyangga utama dalam menstabilkan pasar tenaga kerja di Riau.

Dibandingkan dengan Tren Nasional

Dalam perbandingan dengan tren nasional, TPT di Provinsi Riau secara konsisten berada di atas rata-rata nasional, yang berkisar 5-6% selama 2015-2024, menurut data BPS. Misalnya, pada tahun 2015, TPT nasional mencapai 5,81%, sedangkan Riau di 7,83%; pada tahun 2020, saat pandemi mencapai puncaknya, TPT nasional naik menjadi 7,07%, namun Riau melonjak lebih tinggi menjadi 6,32%. Pada tahun 2024, TPT nasional turun menjadi 5,0%, sementara Riau stabil di 3,70%, namun rata-rata regional Riau tetap lebih tinggi karena ketergantungan pada sumber daya alam yang rentan terhadap kesehatan. Perbedaan ini menunjukkan tantangan spesifik lokal, seperti kekeliruan keterampilan tenaga kerja, di mana banyak pekerja di Riau kurang kompeten dalam teknologi dan industri modern, sebagaimana dikemukakan (BPS, 2025). Hal ini diperparah oleh akses pendidikan lokasi yang minim dan migrasi tenaga kerja yang rumit ke daerah lain, yang membuat struktural struktural lebih akut di Riau dibandingkan wilayah dengan diversifikasi ekonomi yang lebih baik, seperti Jawa atau Bali.

Tabel 1. Perbandingan TPT Nasional dengan TPT Provinsi Riau.

Tahun	TPT Nasional Februari (%)	TPT Nasional Februari (%)	TPT Riau Februari (%)	TPT Riau Agustus (%)
2015	5,81	6,18	6,72	7,83
2016	5,50	5,61	5,94	7,43
2017	5,33	5,50	5,76	6,22
2018	5,10	5,30	5,55	5,98
2019	4,98	5,23	5,36	5,76
2020	4,94	7,07	4,92	6,32
2021	6,26	6,49	4,96	4,42
2022	5,83	5,86	4,40	4,37
2023	5,45	5,32	4,25	4,23
2024	4,82	4,91	3,85	3,70

Sumber: BPS Provinsi Riau.

Tabel 1, tingkat TPT nasional menunjukkan stabilitas yang lebih baik dan nilai yang sedikit lebih rendah dibandingkan TPT di Riau selama beberapa tahun, khususnya pada awal tahun 2015-2019. TPT Riau cenderung agak lebih tinggi dari tahun 2015 hingga 2016, tetapi di masa pandemi 2020, TPT nasional melonjak drastis sedangkan TPT Riau tetap lebih rendah. Pasca-2020, baik TPT Riau maupun nasional mengalami penurunan serupa, dengan TPT Riau yang terus berada di bawah atau mendekati angka nasional. Estimasi untuk tahun 2024 menggambarkan kelanjutan tren penurunan di kedua tingkat, meski TPT Riau masih sedikit lebih rendah.

Faktor lain yang memperlebar kesenjangan ini adalah struktur perekonomian Riau yang masih bergantung pada komoditas primer, seperti minyak, gas, dan perkebunan, yang sensitif terhadap volatilitas harga global. Sementara nasional mengalami pergeseran ke sektor jasa dan manufaktur yang lebih stabil, Riau mengalami kemunduran yang tersembunyi di kalangan pemuda yang belum terintegrasi ke pasar kerja formal. Al Amin & Restikasari (2024) menambahkan bahwa pengangguran tinggi di daerah seperti Riau cenderung negatif dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengurangi masalah sosial seperti kemiskinan kronis. Perbandingan ini menegaskan perlunya strategi lokal yang adaptif, seperti penguatan UMKM untuk menciptakan lapangan kerja inklusif, yang dapat mengurangi kesenjangan dengan tren nasional. Dengan fokus pada pelatihan keterampilan dan investasi di sektor non- tradisional,

Riau dapat mewujudkan ketertinggalan dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional yang merata.

Perbandingan tingkat pengangguran antara Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang pola pengangguran setempat, tabel ini membandingkan rata-rata TPT di tiap kabupaten dan kota, mengacu pada data BPS tahun 2023 yang mencerminkan kecenderungan dari tahun 2015 hingga 2024. Data disusun berdasarkan urutan dari nama-nama kabupaten/kota, dengan perhatian khusus pada rata-rata per tahun. Variasi tersebut merefleksikan perbedaan regional, di mana wilayah kota biasanya memiliki kesempatan kerja yang lebih baik, sedangkan daerah pedesaan atau kepulauan sering kali dibatasi oleh kekurangan infrastruktur dan kurangnya diversifikasi ekonomi.

Tabel 2. Perbandingan TPT antara Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kuantan Singingi	2,60	6,1	6,50	6,05	4,88	5,21	2,06	2,66	2,49	2,48
Indragiri hulu	4,82	6,8	4,73	4,70	4,96	4,91	3,32	2,53	2,47	2,55
Indragiri hilir	7,16	7,2	4,08	4,08	4,76	4,35	2,66	1,50	1,71	1,86
Pelalawan	7,61	5,9	3,55	5,30	4,88	5,99	3,34	2,73	2,26	2,13
Siak	10,02	4,9	5,60	4,13	4,33	5,80	4,34	6,11	5,82	4,53
Kampar	8,07	5,5	5,93	5,45	5,98	6,15	4,27	3,62	3,38	3,67
Rokan hulu	7,82	5,7	6,17	5,40	4,71	4,42	2,25	3,62	3,45	2,73
bengkalis	10,08	8,3	8,62	10,05	9,62	9,31	6,63	7,18	7,09	5,88
Rokan Hilir	8,62	6,4	4,59	6,09	4,96	4,80	3,25	4,55	4,42	4,31
Kepulauan Meranti	9,37	7,0	4,54	6,84	6,19	7,94	4,43	5,50	5,17	4,51
Pecan Baru	7,46	4,2	8,91	8,42	7,86	8,56	8,29	6,40	6,20	4,63
dumai	7,83	5,1	8,94	6,04	6,47	8,15	6,29	5,38	5,15	4,66

Sumber: BPS Provinsi Riau.

Tabel 2. diatas menunjukkan pola perbandingan geografis, Dari tahun 2015 hingga 2024, data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Riau umumnya mengalami penurunan, meski beberapa wilayah masih mengalami perubahan angka yang fluktuatif. Contohnya, Siak dan Bengkalis yang memiliki angka penurunan tinggi pada awal periode berhasil menurunkannya dalam beberapa tahun terakhir. Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Rokan Hilir bahkan terlihat penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan, menandakan berhasilnya pengelolaan ekonomi di daerah tersebut. Namun beberapa wilayah pesisir dan kepulauan seperti Kepulauan Meranti dan Pelalawan masih menghadapi kendala berupa minimnya infrastruktur dan terbatasnya variasi ekonomi, sehingga angka kemiskinan di sana tetap relatif tinggi dibandingkan daerah lain

Peran UMKM dalam Menekan Pengangguran di Provinsi Riau

UMKM memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk menciptakan pekerjaan baru. Dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi, UMKM bisa menekan pengangguran, yang mengakibatkan turunnya angka kemiskinan di Indonesia. Dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah pelaku UMKM terus meningkat dari tahun ke tahun. UMKM mampu menyerap tenaga kerja sekitar 120 juta orang. Ini memberikan sinyal positif bagi angkatan kerja, karena peluang kerja semakin luas. (Safitri, 2020).

Jumlah dan Jangkauan UMKM di Riau

Jumlah UMKM di Provinsi Riau dari tahun 2015 sampai 2024 menunjukkan perubahan yang cukup dinamis. Pada tahun 2015, terdapat sekitar 17.435 unit UMKM, dengan rincian usaha

mikro sebanyak 16.791 unit dan usaha kecil sebanyak 644 unit. Tren ini kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi sekitar 20.950 unit UMKM, terdiri dari 20.000 usaha mikro, 800 usaha kecil, dan 150 usaha menengah. Pada tahun 2017, jumlah tersebut melonjak menjadi 65.733 unit, di mana usaha mikro mencapai 62.371 unit dan usaha kecil 3.362 unit. Puncaknya terjadi pada tahun 2018 dengan 77.876 unit UMKM, terdiri dari 75.215 usaha mikro dan 2.661 usaha kecil. Namun, pada tahun 2019 angka ini turun menjadi 59.837 unit, dengan usaha mikro sebanyak 58.320 unit dan usaha kecil 1.517 unit.

Dampak pandemi COVID-19 terlihat jelas pada tahun 2020 dengan jumlah UMKM sekitar 50.702 unit, terdiri dari 48.750 usaha mikro dan 1.952 usaha kecil. Tahun 2021 mencatat titik terendah dengan 45.595 unit UMKM, usaha mikro 44.976 unit, dan usaha kecil 619 unit. Pada tahun 2022, terjadi pemulihan dengan 46.486 unit UMKM, yang meliputi 44.623 usaha mikro dan 1.863 usaha kecil. Pada tahun 2023, jumlah UMKM di Riau mencapai 62.636 unit, terdiri atas 60.273 usaha mikro, 2.090 usaha kecil, dan 273 usaha menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh aktivitas usaha di wilayah ini (96%) merupakan UMKM, mulai dari kios kecil hingga toko besar (Badan Pusat Statistik, 2023).

Terakhir, pada tahun 2024 jumlah UMKM sedikit menurun menjadi 54.425 unit, dengan usaha mikro 52.839 unit dan usaha kecil 1.586 unit. Secara keseluruhan, UMKM di Riau memegang peranan penting dalam perekonomian lokal, meskipun menghadapi tantangan seperti pandemi dan keterbatasan akses modal. Potensi pertumbuhan yang ada didukung oleh program pemerintah seperti KUR dan digitalisasi. Alasannya Begitu Banyak: Riau kaya akan sumber daya alam dan warga yang inovatif, sehingga UMKM bisa berkembang pesat. Hal ini menjadikan UMKM sebagai fondasi ekonomi lokal, bukan sekadar usaha kecil, melainkan sebagai pembangkit lapangan kerja dan penghasilan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Tabel 3. Data UMKM Provinsi Riau 2015-2024

Tahun	Jumlah UMKM	Mikro	Kecil
2015	17.435	16.791	644
2016	20.950	20.000	800
2017	65.733	62.371	3.362
2018	77.876	75.215	2.661
2019	59.837	58.320	1.517
2020	50.702	48.750	1.952
2021	45.595	44.976	619
2022	46.486	44.623	1.863
2023	62.636	60.273	2.090
2024	54.425	52.839	1.585

Sumber: BPS Provinsi Riau

Riau memiliki sumber daya alam berlimpah dan masyarakat yang inovatif, sehingga UMKM dapat berkembang pesat. UMKM bukan hanya usaha kecil biasa, tetapi juga menjadi penggerak utama lapangan kerja dan sumber penghasilan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Dengan kekayaan sumber daya seperti minyak bumi, gas alam, dan kelapa sawit, serta bahan baku yang mudah diakses untuk produk UMKM mulai dari makanan hingga kerajinan tangan, inovasi warga didukung oleh semangat kewirausahaan yang kuat. Teknologi modern seperti e-commerce juga membantu UMKM menjangkau pasar lebih luas. UMKM tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, khususnya di daerah pedesaan. Dukungan pemerintah melalui kebijakan kredit murah dan pelatihan kewirausahaan semakin memperkuat peran UMKM sebagai motor pembangunan berkelanjutan di Riau.

Bidang Utama yang dikuasai UMKM

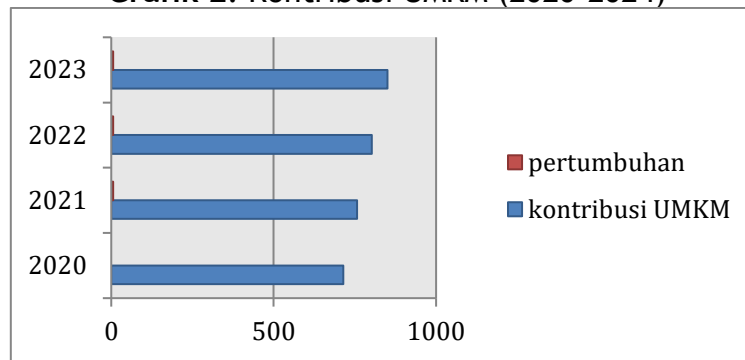
Sektor utama yang dikuasai oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Riau mencakup beberapa bidang penting yang memberikan kontribusi pada perekonomian lokal.

- Perkebunan kelapa sawit adalah yang paling mencolok adalah di mana sejumlah besar UMKM terfokus pada aktivitas seperti budidaya sawit oleh petani kecil atau pengolahan minyak sawit mentah. Hal ini sangat penting karena Riau diakui sebagai salah satu penghasil utama kelapa sawit di Indonesia, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 yang menunjukkan peran besar dalam produksi nasional. UMKM di wilayah ini tidak hanya membantu petani memperoleh pendapatan, tetapi juga memperkuat jaringan pasok industri sawit yang lebih luas, meskipun mereka sering kali menghadapi hambatan seperti melemahkan harga pasar internasional.
- Di sisi lain, bidang perdagangan juga merupakan kekuatan bagi UMKM di Riau, yang mencakup berbagai macam bisnis seperti warung kecil, pasar tradisional yang sibuk, atau bahkan penjualan berani melalui platform online. UMKM ini memiliki peran krusial dalam mempermudah masyarakat mengakses kebutuhan harian, mulai dari bahan makanan dasar hingga produk rumah tangga, dengan dukungan data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2023 yang menyoroti kemampuan mereka dalam menjangkau pelanggan setempat. Hal ini menjadikan perdagangan UMKM menjadi fondasi ekonomi sehari-hari, khususnya di wilayah pedesaan atau perkotaan seperti Pekanbaru.
- Bidang lain yang berpengaruh adalah jasa, yang mencakup layanan praktis seperti bengkel untuk memperbaiki kendaraan, salon kecantikan, atau transportasi umum seperti ojek dan angkutan. UMKM di sektor ini sering kali sangat adaptif, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah, seperti menyediakan layanan cepat untuk acara atau keperluan mendadak. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, keunggulan jasa UMKM ada pada kemampuan mereka beradaptasi dengan situasi setempat, sehingga turut serta dalam menciptakan lapangan kerja dan kenyamanan hidup sehari-hari di Riau.

Secara keseluruhan, bidang ketiga ini saling melengkapi dan menunjukkan potensi UMKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

UMKM berfungsi sebagai fondasi utama perekonomian di Provinsi Riau, memberikan sumbangan yang sangat besar pada Produk Domestik Bruto (PDB) daerah itu, yaitu sekitar 40-45% dari keseluruhan PDB. PDB didefinisikan sebagai ukuran nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi di suatu area dalam periode satu tahun, yang menggambarkan kondisi perekonomian secara menyeluruh, seperti yang diuraikan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2023. Pada tahun yang sama, kontribusi UMKM tersebut tercatat mencapai angka finansial yang luar biasa, yakni Rp 800-900 triliun, yang menunjukkan pentingnya sektor ini dalam memperkuat ekonomi lokal. Jumlah ini diperoleh dari beragam kegiatan yang menghasilkan pemasukan, termasuk penjualan barang domestik seperti hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan khas Riau, plus ekspor produk seperti minyak sawit atau hasil hutan, berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023. Selanjutnya, UMKM di Riau menunjukkan peningkatan stabil sebesar 5-7% setiap tahun, yang berarti cakupan bisnis ini semakin berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga tidak hanya menambah penghasilan bagi pengusaha tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan kerja untuk warga lokal. Peningkatan ini, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, juga membantu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang melimpah sumber daya alam, sehingga menempatkan UMKM sebagai elemen kunci dalam pengembangan ekonomi yang lestari di Riau.

Grafik 2. Kontribusi UMKM (2020-2024)

Sumber: BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM (2020-2023).

Berdasarkan pola pertumbuhan yang stabil tahun 2020 - 2023 seperti yang digambarkan dalam Grafik 2, jelas bahwa UMKM di Riau tidak hanya menjaga kontribusinya terhadap PDB, tetapi juga menunjukkan daya tahan dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perubahan ekonomi. Pertumbuhan tahunan yang stabil sekitar 5-7% menggambarkan efektivitas upaya pemberdayaan UMKM oleh pemerintah daerah serta lembaga terkait, yang meliputi program pelatihan wirausaha, pendanaan akses, dan kampanye promosi barang daerah. Hal ini semakin memperkuat peran UMKM sebagai penggerak utama ekonomi yang inklusif dan lestari, sekaligus membuktikan bahwa bidang ini dapat mengatasi tantangan global melalui pendekatan yang mengandalkan kekuatan lokal.

Pengaruh pada Ketahanan Ekonomi

UMKM memiliki peran penting dalam mempertahankan ketahanan ekonomi di Provinsi Riau. Berkat sumbangsih besarnya pada wilayah PDB, sektor ini membantu perekonomian daerah tetap kuat menghadapi berbagai gangguan luar, seperti wabah penyakit atau naik- turunnya harga bahan pokok. UMKM bisa dianggap sebagai tameng yang menjamin warga tetap memiliki kesempatan untuk bekerja dan menikmati hidup yang layak. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, UMKM di Riau tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi juga membantu menjaga pendapatan keluarga di tengah-tengah dunia.

Selain itu, UMKM menawarkan manfaat jangka panjang yang lebih luas untuk perekonomian Riau. Sektor ini tidak hanya menghasilkan pendapatan langsung bagi pemilik dan karyawan, tetapi juga merangsang kreativitas serta kemajuan teknologi. Misalnya, UMKM di bidang kelapa sawit juga mendukung kegiatan ekspor, yang pada akhirnya membawa devisa ke daerah. Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 mencatat bahwa ekspor dari UMKM sawit telah menjadi elemen kunci dalam perdagangan Riau, menunjukkan bagaimana ide-ide baru di tingkat usaha kecil dapat memberikan dampak signifikan pada skala regional dan nasional. Dengan dukungan semacam ini, UMKM tidak sekedar bertahan, melainkan berkembang, membuka peluang baru untuk masa depan. Secara keseluruhan, UMKM di Riau bukan sekedar usaha kecil, namun pahlawan ekonomi yang mendorong kemajuan daerah.

Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM

Di Provinsi Riau, UMKM tidak semata-mata menjadi pusat aktivitas bisnis setempat, melainkan juga sumber penting kesempatan kerja bagi warga. Berbagai UMKM di wilayah ini membuka pintu bagi individu untuk terjun dalam beragam kegiatan ekonomi, mulai dari pembuatan produk hingga penyebarannya. Dampak ini tidak hanya meningkatkan taraf kehidupan pribadi, tetapi juga berperan besar dalam menekan tingkat kemiskinan di provinsi tersebut. Dengan penekanan pada sisi sosial, UMKM Riau menunjukkan bahwa usaha kecil mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu ukuran krusial dari kontribusi UMKM ini adalah tingkat penyerapan angkatan kerja. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik tahun 2023, UMKM di Riau menampung kurang lebih 70-75% dari seluruh tenaga kerja di provinsi ini. Dengan kata lain, dari setiap sepuluh pekerja di Riau,

sekitar tujuh di antaranya memperoleh lapangan kerja melalui UMKM. Angka tersebut menggambarkan betapa UMKM menjadi penyedia lapangan kerja dominan, yang membantu menjaga keseimbangan ekonomi lokal dan menghindari upaya pemeringkatan.

Dari segi angka, jumlah tenaga kerja yang diserap UMKM di Riau cukup luar biasa. Pada tahun 2023, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM di provinsi ini setara dengan sekitar 2,5 hingga 3 juta pekerja. Bayangkan UMKM sebagai jaring luas yang menampung jutaan jiwa agar terhindar dari keterlantaran kerja. Hal ini menegaskan bahwa UMKM bukan sekedar usaha kecil, melainkan benteng sosial yang krusial bagi masyarakat Riau. Jika dibandingkan dengan skala nasional, peran UMKM di Riau tampak lebih menonjol. Meskipun UMKM umum di Indonesia menyerap sekitar 97% angkatan kerja nasional, proporsi di Riau lebih tinggi karena UMKM sangat menguasai perekonomian daerah ini. Data Badan Pusat Statistik 2023 menegaskan bahwa dominasi ini menjadikan Riau sebagai model bagaimana UMKM bisa menjadi fondasi ekonomi daerah, menyediakan peluang kerja yang lebih luas dan berkesinambungan dibandingkan rata-rata nasional. Oleh karena itu, UMKM di Riau tidak hanya mendorong pertumbuhan bisnis, tetapi juga membentuk dasar kesejahteraan sosial yang tangguh.

UMKM dalam Mengurangi Penganggur Terbuka

Sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, UMKM memiliki kontribusi penting dalam menekan tingkat angka pengangguran melalui berbagai mekanisme yang dapat dilihat dari beberapa aspek berikut

- **Menciptakan Peluang Kerja:** UMKM menghasilkan lapangan kerja baru, baik formal (seperti karyawan tetap di toko besar) maupun informal (seperti pedagang kaki lima atau petani kecil). Ini langsung menurunkan jumlah orang tanpa pekerjaan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).
- **Fokus di Wilayah Pedesaan:** Banyak UMKM di desa-desa Riau, seperti perkebunan atau kios kecil, sehingga penduduk setempat tidak perlu berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Ini seperti menyediakan “tempat kerja” di dekat rumah (Badan Pusat Statistik, 2023).
- **Keuntungannya:** Dengan lebih banyak orang yang bekerja, kemiskinan menurun, dan masyarakat lebih makmur. Misalnya, seorang ibu rumah tangga bisa berjualan online dari rumah, atau petani sawit mendapatkan penghasilan tambahan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Secara keseluruhan, UMKM di Riau seperti penyelamat bagi angkatan kerja, karena mereka menampung jutaan pekerja dan membantu menurunkan pengangguran secara bertahap.

Secara keseluruhan, UMKM di Riau seperti penyelamat bagi angkatan kerja, karena mereka menampung jutaan pekerja dan membantu menurunkan pengangguran secara bertahap.

Hubungan UMKM dengan Tren Pengangguran

UMKM tidak hanya menampung pekerja, tetapi juga memiliki peran besar dalam menurunkan angka kemiskinan di Riau seiring berjalannya waktu. UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap penurunan TPT di Riau. Data menunjukkan bahwa UMKM bertanggung jawab atas 20-25% dari total penurunan TPT antara tahun 2015 dan 2024. Artinya, dari setiap penurunan angka pengangguran yang terjadi, UMKM berkontribusi sekitar seperlima seperempat hinggangnya. Kontribusi ini didasarkan pada laporan Badan Pusat Statistik (2023), yang menyoroti bagaimana UMKM mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi ketergantungan pada sektor formal yang terbatas.

Tren penurunan TPT di Riau menunjukkan kemajuan yang menggembirakan berkat peran UMKM. Angka TPT turun dari 7,83% pada tahun 2015 menjadi 3,70% pada tahun 2024, seperti yang dicatat oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2023). Penurunan ini dapat diibaratkan sebagai “turun tangga” kemiskinan, di mana UMKM yang terus berkembang menjadi pilar utama dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan

dukungan ini, Riau dapat lebih fokus pada pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kesenjangan sosial.

UMKM Bertahan dan Membantu Selama Krisis

Pada masa pandemi COVID-19 antara tahun 2020 dan 2021, sejumlah besar perusahaan besar di Indonesia harus berhenti beroperasi atau mengalami kemerosotan tajam karena pembatasan sosial dan efek ekonomi yang mendalam. Meski demikian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Riau memperlihatkan daya tahan yang mengagumkan. Dengan bantuan pemerintah melalui bantuan kredit, UMKM tersebut bisa survive dan bahkan maju. Informasi dari Badan Pusat Statistik (2023) mengungkapkan bahwa UMKM di Riau sukses menyerap tenaga kerja tambahan sekitar 10-15%, artinya lebih banyak individu yang bisa kembali mendapatkan pekerjaan di tengah situasi darurat. Ini menggambarkan peran UMKM sebagai pilar ekonomi setempat, menyediakan kesempatan kerja ketika bidang lain terhenti total.

- **Program Dukungan Pemerintah untuk UMKM**

Salah satu langkah penting yang membantu kelangsungan UMKM adalah kampanye “Bangga Buatan Indonesia” yang dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2023). Kampanye ini memotivasi warga untuk lebih memilih produk domestik, yang akhirnya meningkatkan volume penjualan UMKM. Berkat motivasi tersebut, UMKM tidak hanya bisa menjaga kegiatan usahanya tetapi juga memperluas skala produksi, sehingga memerlukan lebih banyak karyawan. Ini ibarat memberikan semangat baru pada UMKM supaya tidak runtuh di saat menghadapi ujian pandemi, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai mendukung barang-barang lokal.

- **Hubungan Positif Antara Pertumbuhan UMKM dan Penurunan Pengangguran**

Perkembangan penurunan pengangguran di Riau menunjukkan hubungan positif yang erat dengan kemajuan UMKM. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), saat UMKM tumbuh, angka pengangguran berkurang secara gradual. Keterkaitan ini saling menguntungkan, seperti kolaborasi tim yang kuat untuk meraih sukses bersama. UMKM tidak sekadar menghasilkan lapangan pekerjaan baru, tetapi juga meringankan tekanan pengangguran yang meningkat drastis karena pandemi, sehingga turut memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi wilayah.

UMKM di Riau seperti penyelamat bagi angkatan kerja, karena mereka menampung jutaan pekerja dan membantu menurunkan pengangguran secara bertahap. Bantuan pemerintah lewat stimulus dan inisiatif promosi seperti “Bangga Buatan Indonesia” telah menguatkan UMKM sebagai fondasi ekonomi lokal. Akibatnya, UMKM tidak cuma bertahan selama krisis, tetapi juga menjadi penggerak utama pemulihan ekonomi yang merata.

4.SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan kajian mendalam mengenai pola TPT di tingkat nasional dan Provinsi Riau antara tahun 2015 hingga 2024, serta kontribusi penting UMKM, dapat ditarik kesimpulan bahwa UMKM berperan sebagai elemen utama dalam menekan tekanan di Provinsi Riau. Informasi dari BPS Indonesia menunjukkan turunnya TPT Riau dari 7,83% pada Agustus 2015 menjadi 3,70% pada Agustus 2024, yang menggambarkan pemulihan perekonomian yang solid dan stabil. UMKM, dengan unit usaha sekitar 1,2 juta pada tahun 2023, memberikan kontribusi 99% terhadap seluruh kegiatan bisnis di provinsi ini dan menampung 70-75% angkatan kerja setempat, yang setara dengan 2,5-3 juta tenaga kerja. Sumbangan UMKM pada Produk Domestik Bruto (PDB) Riau mencapai 40-45% (Rp 800-900 triliun pada tahun 2023), dengan laju pertumbuhan tahunan 5-7%, sehingga menjadi pilar utama perekonomian daerah.

Di bidang pokok seperti perkebunan kelapa sawit, perdagangan, dan jasa, UMKM tidak hanya membentuk lapangan kerja informal dan formal, tetapi juga mempertahankan stabilitas ekonomi selama masa krisis, seperti pandemi COVID-19 dari 2020-2021, di mana UMKM dapat menyerap pekerja tambahan 10-15% melalui dukungan stimulus pemerintah. Tren ini menunjukkan adanya hubungan positif antara pertumbuhan UMKM dan penurunan TPT, dengan UMKM menyumbang 20-25% terhadap pengurangan pengangguran di Riau. Berbeda dengan tren nasional, TPT Riau tetap lebih rendah (sekitar 1-2%), yang mengindikasikan efektivitas UMKM dalam mengatasi disparitas ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan sosial, termasuk penurunan kemiskinan dari 7,5% pada tahun 2015 menjadi 6% pada tahun 2023.

Walaupun rintangan seperti ketidakstabilan harga komoditas global dan keterbatasan akses modal masih menjadi masalah, peran UMKM dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Riau terbukti sangat vital. UMKM mendorong inovasi, diversifikasi ekonomi, dan ekspor (dengan nilai Rp 50 triliun pada 2023), yang tidak hanya mengurangi degradasi struktural tetapi juga memperkuat kompetensi regional. Secara keseluruhan, UMKM telah menunjukkan dirinya sebagai alat yang efektif untuk pembangunan ekonomi di Provinsi Riau sampai tahun 2024, dengan potensi untuk terus berkontribusi pada stabilitas ketenagakerjaan dan pertumbuhan sosial-ekonomi di masa mendatang. Kajian ini menekankan pentingnya dukungan kebijakan untuk mempertahankan momentum positif tersebut, memastikan UMKM tetap menjadi pilar utama dalam mengatasi tantangan kemiskinan di Indonesia.

Saran

Bagi pemerintah Pusat dan Daerah Riau, tingkatkan bantuan bagi UMKM dengan memperluas program kredit mikro seperti KUR yang menawarkan bunga rendah dan syarat yang lebih sederhana, serta memberikan insentif pajak khusus untuk UMKM yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, contohnya perkebunan kelapa sawit ramah lingkungan. Alokasikan investasi untuk membangun infrastruktur digital di wilayah pedesaan guna meningkatkan akses pasar ekspor dan e-commerce. Selain itu, melaksanakan program pelatihan kewirausahaan secara intensif di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi, seperti daerah kepulauan atau pedesaan, untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan produktivitas UMKM, dengan sasaran menekan tingkat pengangguran di bawah 3% pada akhir tahun 2024. Pemerintah juga dapat memfasilitasi kerja sama antara UMKM dan perusahaan besar untuk rantai pasokan yang stabil, serta menyatukan harga komoditas melalui kebijakan stabilisasi pasar.

Bagi Pelaku UMKM, memanfaatkan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada untuk memperluas penjualan produk lokal, serta menerapkan aplikasi manajemen inventaris dan keuangan untuk mengoptimalkan operasional dan mengurangi biaya. Bentuk koperasi atau asosiasi UMKM untuk mendapatkan akses bahan baku yang lebih murah dan pasar yang lebih luas, terutama di sektor sawit dan perikanan, yang dapat menciptakan rantai nilai yang lebih kuat dan mengurangi risiko kemiskinan. Tingkatkan kualitas produk melalui sertifikasi hijau atau inovasi teknologi, seperti penggunaan aplikasi pertanian digital, untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Selain itu, ikuti program pelatihan dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat untuk mengembangkan keterampilan bisnis, seperti pemasaran digital atau manajemen keuangan, agar UMKM dapat bertahan dari tantangan ekonomi global.

Bagi para peneliti, lakukan penelitian empiris dengan metode kuantitatif seperti analisis regresi linier atau model ekonometrik untuk mengukur hubungan kausal antara pertumbuhan UMKM dan penurunan TPT, dengan memasukkan variabel kontrol seperti gender, pendidikan, dan investasi infrastruktur. Bandingkan data Riau dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Barat atau Jambi untuk perspektif regional yang lebih luas, dan gunakan data BPS Sakernas hingga 2024 untuk validasi model. Merekomendasikan kebijakan berbasis data, seperti simulasi dampak program KUR terhadap penyerapan energi kerja, serta mengembangkan kajian

longitudinal untuk memadukan tren jangka panjang. Kolaborasi dengan universitas lokal dapat menghasilkan rekomendasi praktis, seperti model UMKM digital untuk daerah pedesaan.

Bagi para masyarakat dan Investor, dorong berpartisipasi aktif dalam UMKM melalui investasi kecil-kecilan atau pembelian produk lokal untuk mendukung penciptaan lapangan kerja secara tidak langsung. Edukasi masyarakat tentang pentingnya UMKM melalui kampanye media sosial atau program sekolah dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi, mengurangi kemiskinan struktural di Riau. Investor swasta dapat memberikan modal ventura untuk UMKM inovatif, seperti startup pertanian digital, dengan fokus pada keinginan untuk mendapatkan manfaat jangka panjang. Masyarakat juga dapat terlibat dalam program CSR perusahaan untuk mendukung UMKM lokal, seperti pelatihan atau akses pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amin, M., & Restikasari, D. (2024). Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 45-6
- Arsyad, L. (2019). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Statistik Indonesia 2025*. Jakarta: BPS.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perekonomian Indonesia 2022*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Fitriani, R. (2022). Digitalisasi UMKM dan Penyerapan Tenaga Kerja di Riau. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 10(1), 33-47.
- International Labour Organization (2022). *World Employment and Social Outlook: Trends 2022*. Geneva: ILO.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2024). *Laporan Ekonomi Indonesia 2024*. Jakarta: Kemenko Ekonomi.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Laporan Tahunan UMKM Indonesia 2023*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kuncoro, M. (2013). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Lestari, S., & Wicaksono, A. (2023). UMKM dan Pembangunan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, 25(1), 12-25.
- Malihah, N. (2024). Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 8(2), 101-115.
- Seri, A., Pratama, B., & Nugroho, T. (2023). Transformasi Digital UMKM di Era Pandemi. *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, 7(3), 77-89.
- Siregar, H., & Wibowo, S. (2020). Kebijakan Fiskal dan Penurunan Pengangguran di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Regional*, 12(1), 88-102.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. (2019). *UMKM di Indonesia: Peran dan Tantangan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson education.